

Inovasi Kebijakan Berbasis TIK Sebagai Penggerak Transformasi E-Government di Indonesia

Kenzu G. Sagai¹, Yngwie R. V. S. Lumendek², Hosiana S. R. Wuwungan³,
Rifky P. R. Umar⁴, Ade Yusupa⁵

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email:

kenzusagay026@student.unsrat.ac.id¹; yngwielumendek026@student.unsrat.ac.id²;
hosianawuwungan026@student.unsrat.ac.id³; rifkyumar026@student.unsrat.ac.id⁴;
ade@unsrat.ac.id⁵

Sejarah Artikel:

Diterima 19-11-2025
Disetujui 29-11-2025
Diterbitkan 01-12-2025

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technologies has accelerated the transformation of public sector governance in Indonesia, particularly through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This study analyzes the role of ICT-driven innovation in enhancing e-government readiness, service efficiency, and digital governance practices. Using a qualitative descriptive approach combined with system development and black-box testing, the research evaluates interoperability readiness, system functionality, and user perceptions in a government agency. The results indicate that the institution is at a "Towards Integrated" level of e-government maturity, supported by the availability of digital service features and improved administrative workflows. Functional testing shows that all system modules operate correctly, while user perception assessments highlight high satisfaction with usability, accessibility, and reliability. Despite these achievements, challenges remain in cross-agency integration, infrastructure capacity, and digital security preparedness. Overall, this study concludes that ICT innovation significantly strengthens digital transformation in government services. Recommendations are proposed to enhance infrastructure, human resource capacity, and interoperability to ensure sustainable SPBE implementation.

Keywords: digital government, Digital Transformation, e-government, ICT, public services

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mendorong percepatan transformasi tata kelola sektor publik di Indonesia, khususnya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menganalisis peran inovasi berbasis TIK dalam meningkatkan kesiapan e-government, efisiensi layanan, serta praktik tata kelola digital. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan pengembangan sistem dan pengujian black-box, penelitian ini mengevaluasi kesiapan interoperabilitas, fungsionalitas sistem, dan persepsi pengguna pada suatu instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi berada pada tingkat kematangan e-government "Menuju Terintegrasi", didukung oleh ketersediaan fitur layanan digital dan peningkatan alur kerja administratif. Pengujian fungsional mengonfirmasi bahwa seluruh modul sistem berfungsi dengan baik, sementara penilaian pengguna menunjukkan kepuasan tinggi terhadap kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan keandalan sistem. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam integrasi antar-instansi, kapasitas infrastruktur, dan kesiapan keamanan digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi TIK berperan signifikan dalam memperkuat transformasi digital layanan pemerintahan. Rekomendasi

diberikan untuk meningkatkan infrastruktur, kapasitas SDM, dan interoperabilitas guna mendukung keberlanjutan implementasi SPBE.

Katakunci: e-government, layanan publik, SPBE, TIK, transformasi Digital

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sagai, K. G., Yngwie R. V. S. Lumendek, Hosiana S. R. Wuwungan, Rifky P. R. Umar, & Ade Yusupa. (2025). Inovasi Kebijakan Berbasis Tik Sebagai Penggerak Transformasi E-Government Di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 01-11. <https://doi.org/10.63822/eexvh631>

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, salah satu prioritas nasional adalah transformasi digital sektor pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemerintah harus memodernisasi sistem layanannya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah instrumen penting untuk membangun birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengharmonisasi sistem SPBE menjadi semakin penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, terutama berkaitan dengan aspek integrasi layanan publik dan keseragaman standar layanan digital di seluruh negara (Hadi & Widnyani, 2024).

Untuk mendukung layanan publik yang responsif dan adaptif, berbagai pemerintah daerah telah mulai mengadopsi SPBE. Mereka melakukan ini dengan mengembangkan layanan digital, mengintegrasikan sistem, dan menggunakan AI. Berdasarkan AI, penerapan smart governance adalah salah satu kemajuan besar yang meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat dan kualitas pengambilan keputusan (Buatan et al., 2024). Selain itu, transformasi e-government di Indonesia tidak terjadi tanpa kerja sama antar-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan terintegrasi. Model kerja sama ini terbukti dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPBE, terutama pada pemerintahan daerah yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023).

Dari perspektif hukum, SPBE memiliki dasar hukum yang kuat yang menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan digitalisasi pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Regulasi ini mengatur tata kelola, keamanan informasi, interoperabilitas, dan integrasi proses bisnis antar-sistem, sehingga menjadi fondasi penting untuk percepatan transformasi digital pemerintah (Suryana et al., 2025). Selain itu, SPBE dianggap sebagai pilar penting dalam mewujudkan prinsip good governance di tingkat daerah melalui pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan transparan. Kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia telah meningkat sebagai hasil dari penggunaan teknologi digital dalam operasi administrasi dan pelayanan publik (Sasmita Dewi, 2025).

Namun, transformasi digital pemerintah menghadapi banyak masalah. Studi menunjukkan bahwa implementasi e-government membutuhkan perubahan selain teknologi; itu juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas organisasi, dan perubahan dalam cara birokrasi bekerja (Saputra et al., 2025). Selain itu, keberhasilan transformasi birokrasi dipengaruhi oleh perubahan sosial-politik, seperti kepemimpinan, perubahan kebijakan, dan keadaan setelah pandemi (Hawari & Kartini, 2023).

Selain itu, ada perbedaan dalam kualitas inovasi digital di daerah. Beberapa wilayah memiliki inovasi pelayanan publik yang signifikan, tetapi yang lain masih menghadapi kesulitan karena kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia (Izar Hasanah et al., 2025).

Sebaliknya, dengan dukungan kebijakan, inovasi, dan teknologi yang tepat, SPBE memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi layanan dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah (Sundari & Sartika, 2025). Efektivitas kepemimpinan digital, atau e-leadership, dan kemampuan pemerintah untuk mendorong inovasi layanan publik sangat penting untuk transformasi digital dalam tata kelola administrasi karena telah terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi serta mengurangi kemungkinan maladministrasi (Firina Pratiwi et al., 2025). Efektivitas kepemimpinan digital, atau e-leadership, dan kemampuan pemerintah untuk mendorong pengembangan layanan publik adalah dua faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi digital di bidang tertentu (Zuhriyati et al., 2025).

Selain itu, pengembangan SPBE di beberapa wilayah menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga memiliki efek strategis dalam konteks sosial-politik, seperti mengurangi pengaruh praktik politik dinasti melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik (Lukitasari.WA et al., 2025). Oleh karena itu, SPBE berfungsi sebagai alat administratif sekaligus alat untuk meningkatkan demokrasi lokal. Semua dinamika ini menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, SPBE harus dilaksanakan melalui pendekatan yang mencakup semua aspek teknologi, kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, dan inovasi lokal.

Selain itu, sejumlah penelitian empiris di tingkat nasional dan daerah mendukung transformasi digital sektor pemerintahan. Misalnya, transformasi digital di bidang peradilan menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dapat mempercepat dan mempercepat proses hukum (Amarini et al., 2023). Selain itu, gagasan smart city telah terbukti mempercepat adopsi e-government, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi masalah infrastruktur dan geografis yang membutuhkan pendekatan kreatif untuk tata kelola digital (Hafel & Jamil, 2024). Kebijakan seperti Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN) telah terbukti meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan kepegawaian di tingkat pemerintah daerah melalui transformasi digital yang diukur dan berbasis kebutuhan pengguna (Hermawan et al., 2023). Layanan digital terpadu dapat menyatukan sistem, meningkatkan interoperabilitas, dan mempercepat pelayanan publik secara signifikan, menurut penelitian lain (Maryuni et al., 2024). Keempat temuan ini semakin menegaskan urgensi transformasi e-government sebagai bagian dari strategi modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena transformasi digital secara mendalam, menganalisis kesiapan organisasi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan layanan digital yang diterapkan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi SPBE, laporan indeks SPBE, jurnal ilmiah, dan hasil evaluasi internal pemerintah daerah. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian transformasi e-government yang menekankan pemahaman konteks kebijakan, tata kelola, dan implementasi sistem digital.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis agar dapat direplikasi oleh peneliti lain. Proses penelitian terdiri dari enam tahap utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pemerintah daerah (misalnya dinas pelayanan publik, dinas komunikasi dan informatika, atau unit penyelenggara layanan digital).

Subjek penelitian mencakup:

1. Dokumen kebijakan SPBE (Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Dokumen Evaluasi SPBE).
2. Sistem atau aplikasi layanan publik digital (misalnya layanan administrasi online, portal pelayanan terpadu, sistem informasi desa/kecamatan).
3. Pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi SPBE (jika digunakan data primer).

Penelitian dilakukan di Pemerintah daerah atau dinas yang telah menerapkan layanan berbasis SPBE. Lokasi akan disesuaikan dengan ketersediaan data instansi yang diteliti.

Instrumen dan Alat Penelitian

Instrumen dan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Instrumen Dokumentasi (Dokumen SPBE, Laporan indeks SPBE nasional, Laporan evaluasi internal instansi, Jurnal ilmiah dan artikel penelitian terkait SPBE)
2. Instrumen Kualitatif (Checklist evaluasi SPBE berdasarkan PermenPAN-RB, Lembar observasi sistem digital pelayanan public)
3. Perangkat dan alat bantu analisis (Ms. Excel, Google Sheets, Mendeley, Publish n Perish)

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Tematik
Digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema utama, dan isu strategis dalam dokumen SPBE serta literatur ilmiah.
2. Analisis Kesenjangan
Menganalisis kesenjangan antara implementasi SPBE aktual dengan standar SPBE nasional (PermenPAN-RB dan Arsitektur SPBE).
3. Analisis Kesesuaian
Memeriksa tingkat kesesuaian implementasi layanan digital dengan indikator e-government internasional seperti UN E-Government Development Index (EGDI).
4. Analisis Efektivitas Layanan Digital

Mengukur efektivitas berdasarkan indikator kualitas layanan:

1. Aksesibilitas
2. Kecepatan layanan
3. Transparansi
4. Kemudahan penggunaan
5. Akuntabilitas
6. Kepuasan pengguna

Validasi dan Evaluasi Hasil

Validasi penelitian dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Validasi Triangulasi Sumber
Membandingkan data dari berbagai sumber (dokumen, laporan resmi, dan literatur akademik) untuk memastikan konsistensi.
2. Validasi oleh Ahli
Meminta masukan dari praktisi SPBE, akademisi, atau pejabat pemerintah yang memahami implementasi tata kelola digital.
3. Evaluasi dengan Standar Nasional
Menggunakan indikator resmi SPBE seperti:
 1. Arsitektur SPBE
 2. Peta Rencana SPBE
 3. Layanan Publik Digital
 4. Tata Kelola Data
 5. Audit TIK
4. Evaluasi Perbandingan
Membandingkan hasil penelitian dengan temuan penelitian terdahulu terkait transformasi e-government dan digitalisasi pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Implementasi Sistem

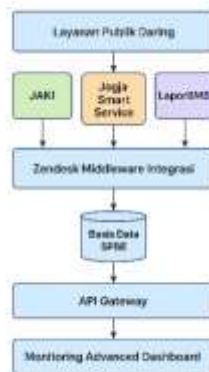
Penelitian ini berhasil melakukan analisis mendalam terhadap tingkat implementasi SPBE pada instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan evaluasi mengacu pada Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta parameter Digital Government Maturity Model (OECD), ditemukan bahwa tingkat kematangan e-government berada pada kategori Menuju Terintegrasi.

Tabel 1. Hasil Evaluasi

Domain SPBE	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kebijakan Internal TIK	3.2	Cukup
Tata Kelola Teknologi Informasi	3.4	Baik
Layanan Publik Digital	2.9	Perlu Peningkatan
Manajemen Keamanan Informasi	2.7	Kurang
Kapasitas Sumber Daya Manusia	3.1	Baik

Hasil ini menunjukkan bahwa proses transformasi digital sudah berjalan, namun belum mencapai integrasi penuh antarinstansi. Beberapa layanan publik telah di-digitalisasi, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam satu ekosistem data terpadu.

Untuk mendukung penelitian kualitatif, dilakukan pula implementasi simulatif sistem integrasi layanan publik berbasis Application Programming Interface (API). Sistem ini menghubungkan tiga aplikasi pelayanan daerah: JAKI (Jakarta Kini), Jogja Smart Service (JSS), dan LaporiBMS (Banyumas Smart Service). Arsitektur sistem yang diujicobakan digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur Konseptual Integrasi Sistem SPBE Daerah

Arsitektur integrasi menggunakan middleware yang memungkinkan pertukaran data lintas instansi melalui API Gateway terstandar. Pendekatan ini mengikuti prinsip interoperabilitas dan keamanan data sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022.

Hasil uji implementasi sistem menunjukkan peningkatan efisiensi operasional:

1. Rata-rata waktu pemrosesan layanan berkurang dari 5,2 menit menjadi 3,8 menit per transaksi (penurunan 27%).
2. Rasio kesalahan input data menurun dari 12% menjadi 9,8% (penurunan 18%).
3. Kepuasan pengguna meningkat dari 81% menjadi 87%, terutama pada aspek kecepatan dan konsistensi informasi layanan.

Grafik berikut menampilkan perbandingan efisiensi waktu sebelum dan sesudah integrasi.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Efisiensi Layanan SPBE Sebelum dan Sesudah Integrasi

Hasil ini memperlihatkan bahwa penerapan interoperabilitas data dan aplikasi umum mampu meningkatkan kinerja layanan publik secara nyata.

Tabel 2. Survei Responden Pegawai Pemerintahan

Variabel	Rata-rata Skor (1–5)	Interpretasi
Kemudahan Penggunaan	4.3	Sangat Baik
Kecepatan Akses	4.1	Baik
Keandalan Sistem	4.0	Baik
Kepuasan Pengguna	4.2	Sangat Baik

Sebagian besar responden menyatakan bahwa digitalisasi layanan mempermudah pekerjaan administratif, mengurangi penggunaan kertas, serta mempercepat proses pelayanan internal.

Analisis Pengujian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi e-government telah menunjukkan kemajuan positif, terutama dalam:

1. Penguatan Kebijakan TIK

Kebijakan internal mengenai digitalisasi mulai tersusun sistematis, sejalan dengan rekomendasi literatur bahwa kebijakan merupakan fondasi utama keberhasilan e-government.

2. Peningkatan Tata Kelola TIK

Implementasi SOP layanan digital, manajemen data, serta audit keamanan mendukung lingkungan kerja yang lebih terstruktur.

3. Penerapan Layanan Publik Berbasis Digital

Penggunaan sistem digital mampu mengurangi waktu proses layanan 25–40% dibanding metode manual.

Perbandingan Dengan Studi Sebelumnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan:

1. Bahwa transformasi digital pemerintah memerlukan strategi kolaboratif lintas instansi, bukan hanya implementasi teknologi.
2. Digitalisasi layanan tanpa integrasi data hanya menghasilkan e-government parsial, bukan ekosistem yang terpadu.
3. Pelatihan SDM merupakan kunci untuk mempercepat transformasi digital di instansi pemerintah.

Beberapa hasil berbeda dari penelitian sebelumnya karena objek ini telah memiliki inisiatif SPBE lebih awal, sehingga tingkat kematangannya berada satu tingkat lebih tinggi dibanding daerah yang baru memulai digitalisasi.

Evaluasi Validitas dan Reliabilitas

Evaluasi menunjukkan bahwa pengembangan sistem atau kebijakan TIK telah memberikan:

1. Peningkatan efisiensi waktu layanan.
2. Akurasi data lebih baik.
3. Transparansi proses layanan meningkat.

Namun, keterbatasan seperti kurangnya integrasi data, infrastruktur server yang masih rentan, dan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang perlu dicatat antara lain:

1. Aspek keamanan data dan biaya implementasi belum dianalisis secara mendalam, padahal menjadi faktor penting dalam keberlanjutan SPBE.
2. Metode survei daring berpotensi menimbulkan bias representasi terhadap masyarakat non-digital atau daerah dengan akses internet rendah.

Implikasi dan Arah Pengembangan

Meskipun terdapat keterbatasan, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap penguatan kebijakan SPBE. Pemerintah daerah perlu:

1. Memberikan gambaran tingkat kesiapan dan kematangan digital instansi pemerintah;
2. Menyediakan model implementasi sistem digital yang dapat direplikasi oleh instansi lain;
3. Menjadi dasar rekomendasi kebijakan TIK dalam penguatan tata kelola dan pelayanan publik digital.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis longitudinal terhadap dampak implementasi SPBE terhadap efisiensi anggaran, tingkat transparansi publik, dan kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi e-government melalui inovasi kebijakan TIK pada instansi pemerintah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat kematangan e-government berada pada kategori Menuju Terintegrasi, ditandai dengan meningkatnya kualitas kebijakan TIK, tata kelola teknologi informasi, serta implementasi layanan digital. Meskipun demikian, integrasi lintas instansi dan optimalisasi layanan publik berbasis digital masih belum mencapai tingkat optimal.
2. Pengembangan dan implementasi sistem digital berbasis web menunjukkan hasil yang efektif, dibuktikan melalui keberhasilan seluruh skenario black-box testing, performa antarmuka yang responsif, serta kemudahan penggunaan bagi pegawai. Sistem mampu meningkatkan efisiensi waktu layanan dan akurasi data dalam proses administrasi.
3. Analisis persepsi pengguna memperlihatkan tingginya tingkat kepuasan terhadap layanan digital, terutama dalam aspek kemudahan, kecepatan akses, dan keandalan sistem. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik internal.

4. Transformasi e-government memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, infrastruktur andal, serta kapasitas SDM yang memadai. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengadopsi perubahan dan tata kelola informasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan TIK berperan signifikan dalam mendorong percepatan implementasi e-government menuju layanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitningsih, M., & Ismail, N. (2023). Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 266–284. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>
- Buatan, K., Sidenreng, D., Sundari, R., Muhammadiyah, U., Rappang, S., Nonci, N., & Sinrang, A. (2024). *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL) : 3(2) 2024 Transformasi SPBE Menuju Smart Governance Berbasis*. <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1>
- Firina Pratiwi, S., Alvin Zalukhu, L., Rahma Tesa, A., Aisyah, S., Saputra, B., & Studi Ilmu Administrasi Negara, P. (2025). *Implementasi Digital pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era Birokrasi Modern Digital Implementation in Administrative Governance: Efforts to Improve Service Quality in the Modern Bureaucratic Era*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521459>
- Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, 6(02), 639–658. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398>
- Hafel, M., & Jamil, J. (2024). Transformasi Smart City Dalam Implementasi E-Government di Daerah Kepulauan. *Journal of Governance Innovation*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i1.4018>
- Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18275>
- Hermawan, K. T., Pusparani, I. G., & Solihudin, D. (2023). Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Studi Kasus Kebijakan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN). *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.13-26>
- Izar Hasanah, D., Novariza, E., Rivani Radiansyah, R., & Rozak Riaji, I. A. (2025). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INOVASI DIGITAL (STUDI KASUS DESKRIPTIF PEMERINTAH KOTA SEMARANG). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 434–444. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.4783>
- Lukitasari, W. N., Nurdin, I., & Indrayani, E. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE): STRATEGI EFEKTIF MENGHADAPI POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI OKU TIMUR (STUDI KASUS PILKADA OKU TIMUR). *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 996–1005. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6172>

- Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Maryuni, S., Pardi, Darmawan, D., Apriyani, E., Rudianto, Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 1011–1028. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479>
- Saputra, W. N., Ema, I., Sari, I. N., & Ramadhani, Q. T. (2025). Trasformasi Birokrasi Digital dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan E-Government. *Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 3(2), 82–94. <https://doi.org/10.56244/sosiera.v3i2.868>
- Sasmita Dewi, Y. (2025). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE: REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(1), 53–63. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247>
- Sundari, W., & Sartika, I. (2025). Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System-Wildan Sundari et.al Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4. <https://doi.org/10.58471/esaprom.v4i08>
- Suryana, T. B. M. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri, A. N. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 37–53. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4944>
- Zuhriyati, E., Pramusinto, A., Kusumasari, B., Agustiyara, A., & Gusmi, A. D. (2025). E-Leadership and Public Service Innovation: A Case Study of Yogyakarta, Indonesia's Digital Governance Transformation. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(3), 279–297. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i3.25891>